STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Jony Puspa Kusuma¹, Andi Lopa Ginting²

Universitas Terbuka, Jakarta

jonny@ecampus.ut.ac.id¹, andi.lopaginting@ecampus.ut.ac.id²

Submitted: 11th Nov 2020/ **Edited:** 25th Dec 2020/ **Issued:** 01st Jan 2021

Cited on: Kusuma, J. P., & Ginting, A. L. (2021). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 81-90.

ABSTRACT

The existence of a mining company for the community is considered quite detrimental and leads to negative things, especially with all forms of natural exploitation and processing that can cause environmental damage which is very worrying for the people living around it. Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations that must be carried out by companies from the impacts that have been caused to society and the environment. Based on the Laws and Government Regulations governing CSR, local governments have an important role in the management and implementation of CSR funds in the community so that they can provide benefits to the local community, sustainably and in line with the development objectives of the regional government programs. The focus of this study is to determine the strategy of the Kolaka Regency local government in implementing CSR program management in Kolaka Regency using a SWOT analysis. This research is a qualitative descriptive study. The implementation of the CSR program carried out by the Regional Government together with the Company to the Kolaka Regency Community has not been optimal. The impact of the CSR Program on Community Welfare in Kolaka Regency is only felt by the people who live around the Company.

Keyword: CSR, SWOT analysis, local government

PENDAHULUAN

Industri pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan dari segi jumlah, terutama untuk pertambangan nikel. Kekayaan alam nikel Indonesia yang begitu besar, membuat negara ini masuk dalam jajaran peringkat atas sebagai salah satu negara pemasok terbesar bijih nikel di dunia (Sosilawati, et, al., 2016).

Keberadaan perusahaan pertambangan di suatu daerah berpotensi mengubah lingkungan masyarakat daerah sekitar. Perubahan-perubahan itu dapat berdampak positif ataupun negatif terhadap masyarakat sekitar, baik dari aspek kondisi fisik alam maupun sosial dan budaya. Saat ini penduduk lebih sadar akan dampak yang terjadi terhadap lingkungan hidup (Muttakin & Khan, 2014). Berbagai dampak sosial yang ditimbulkan dengan berdirinya suatu perusahaan dalam suatu kawasan memaksa perusahaan tersebut turut ambil bagian dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya (Badaruddin, 2018; Pradita & Suryono, 2019). Garcia-Chiang (2018) dalam penelitiannya di Meksiko tentang tanggung jawab sosial menyatakan bahwa perlunya untuk mengembangkan metodologi pendekatan dan penilaian yang tepat untuk menerapkan tindakan tanggung jawab sosial perusahaan di setiap wilayah untuk merangsang pembangunan lokal.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. CSR telah diatur secara tegas di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dikenal dengan UU Minerba yang tertuang pada Pasal 108 ayat (1) dengan menggunakan istilah Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pada Pasal 36 ayat (1) dan (2) yang berisi tentang dana yang disisihkan perusahaan untuk penanganan fakir miskin; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 pada Bab XII tentang Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diwajibkan oleh Perseroan terbatas.

Corporate Social Responsibility bermakna bahwa suatu korporasi harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya yang berdampak terhadap masyarakat, komunitas dan lingkungan (Lawrence & Weber, 2014). CSR sebetulnya adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan baik dampak positif maupun dampak negatif (Widiastuti, et, al., 2018). CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk

meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis (Nurbaiti & Bambang, (2017)

Untuk menghindari dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan perlu dilakukan kegiatan CSR (Tilt, 2016; Torrico, et, al., 2018) yang merupakan kewajiban perusahaan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah dieksploitasi termasuk di dalamnya adalah secara samar untuk meningkatkan pengaruh branding perusahaan dalam pandangan masyarakat (Mallik & Sahu, 2015; Miras-Rodríguez, Met, al., 2020). Namun pada kenyataannya Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia masih banyak dalam tahap clarity yang hanya bersifat bantuan kepada masyarakat. Sebagian besar perusahaan masih melakukan CSR bukan sebagai tanggung jawab sosialnya saja tetapi melaksanakan sebagai keuntungan komersial bagi perusahaan (Nayenggita, et, al., 2019)

Kabupaten Kolaka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah untuk mensejahterakan masyarakatnya dari sektor pertambangan. Dinas ESDM Kabupaten Kolaka (2014) mencatat bahwa sebaran potensi tambang Nikel memiliki luas 44.062 Ha, Onix seluas 635,7 Ha, Marmer seluas 30.010 Ha, Pasir Kuarsa seluas 53.040 Ha, dan Batu Sabak seluas 130.313,6 Ha. Besarnya potensi pertambangan nikel di daerah ini menarik minat banyak pengusaha lokal maupun dari luar daerah untuk melakukan eksploitasi baik secara resmi maupun illegal.

Pada aspek lain, belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perda. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas CSR. Diantaranya, Pertama, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR. Kedua, tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani CSR, karena selama ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Human Resources Development* (HRD). Ketiga, perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola CSR (Yulina & Sobandi, 2020).

LANDASAN TEORI

Secara prinsip tanggung jawab sosial adalah kontribusi, apa artinya? Bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh suatu badan atau organisasi, hendaknya bersifat kohesif. Di mana keuntungan yang didapat dibagikan secara proporsional dan profesional kepada pihak-pihak yang berhak, termasuk masyarakat. Hal ini menegaskan, bahwa setiap tindakan tidak hanya mementingkan pihak yang terlibat secara langsung, namun pihak terluar, bahkan terjauh sekalipun harus diperhatikan (Fahrial, et, al., 2019). Tentu, dalam konteks bisnis ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* atau disingkat dengan CSR.

Belakangan ini istilah CSR menggema di berbagai instansi besar, hal ini sejalan dengan program lembaga keuangan dunia, yang menetapkan CSR sebagai bagian dari penyelenggaraan organisasi yang baik (*good governance*). Menggemanya CSR, secara prinsip mengingatkan peran pihak-pihak berkemampuan ekonomi akan kiprahnya sebagai makhluk sosial, maka hendaknya sedikit dari keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat (Pramukti & Buana, 2019). Terlepas hal tersebut dalam konteks bisnis dipandang sebagai pengeluaran.

Selain itu, CSR dipersepsikan sebagai bagian dari strategi suatu organisasi di dalam memainkan keadaan ekonomi. Apa artinya? Faktanya perusahaan butuh peran masyarakat di dalam membangun eksistensinya, dalam konteks CSR adalah citra positif. Dengan pesatnya akses informasi, ini menjadi hal menguntungkan secara bisnis, maka tidak ada alasan “tidak” bagi suatu lembaga untuk meningkatkan kegiatan CSR sebagai bagian dari memperkuat brand atau citra (Rosilawati & Mulawarman, 2019; Zuraidah, 2019).

Dalam kajian sosial CSR dipandang sebagai wujud kepedulian organisasi, yang kontribusinya adalah mempengaruhi emosional masyarakat, dan dengan itu organisasi mendapatkan penilaian baik (Nayenggita, et, al., 2019; Rinawati & Sadewo, 2019). Dalam konteks pemerintahan, ini menjadi kekuatan politik, bahwa CSR adalah bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan, kenapa demikian? Karena masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kerja pemerintah, yakni melalui program CSR, tentu hal tersebut secara langsung menjadi dasar penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Bahwa hadirnya CSR adalah kebenaran penyelenggaraan yang

dibutuhkan masyarakat, ketimbang program-program eksklusif lain, yang secara tidak nyata dirasakan.

Dalam sebuah riset dikemukakan, tidaklah dipandang nyata suatu kekuasaan melainkan keberpihakan masyarakat, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan program kegiatan sosial (misalnya CSR). Lebih lanjut, bila perlu pemerintah membuat suatu kebijakan konkret atas seluruh potensi yang dapat diakomodir terkait kegaitan-kegiatan tanggung jawab sosial dari berbagai pihak, sehingga menjamah masyarakat secara luas dan berkesinambungan (Hakim, et, al., 2019; Gumuru, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Bentuk desain penelitian adalah studi kasus setting tunggal. Subjek penelitian ini adalah Asisten I Pemda Kabupaten Kolaka, Balitbang, BPKAD, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang bermukim dekat dengan lokasi pertambangan. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling.

HASIL PENELITIAN

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam pengelolaan Program CSR berada dalam kondisi belum mampu memanfaatkan peluang secara optimal dan sangat lemah dalam mengatasi masalah atau hambatan yang dihadapi. Hasil ini didukung oleh hasil wawancara mendalam dengan Sekretaris BPKAD Kabupaten Kolaka, yang menyatakan “Bahwa selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka hanya menerima laporan dari Perusahaan terkait dengan pelaksanaan Program CSR dan besarnya anggaran dari setiap Program CSR pun tidak diketahui sebelumnya”.

Secara spesifik yang dimaksud “belum mampu memanfaatkan peluang secara optimal” adalah:

1. Tidak ada unit khusus yang menangani program CSR, sehingga pelaksanaannya kurang profesional. Hal ini berdampak pada banyak hal di antaranya kurang

perencanaan, kurang orientasi, kurang juklak dan juknis, kurang fasilitas, dan kurang mendapat dukungan.

2. Belum dapat memangsimalkan potensi penyerapan anggaran CSR, baik internal maupun eksternal, sehingga program CSR belum berdampak luas.
3. Pelaksanaan program CSR belum dapat dilakukan secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait, sehingga skalanya belum besar.
4. Program CSR baru sebatas dilaksanakan, belum bersifat terstruktur dan berorientasi, sehingga dampaknya belum signifikan dirasakan oleh masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “lemah dalam mengatasi masalah atau hambatan yang dihadapi” adalah:

1. Kinerja unit yang ditunjuk sebagai pelaksana kurang maksimal, secara psikologis melahirkan kesan kurang termotivasi di dalam menjalankan program CSR. Sehingga ketika ada kendala di lapangan (pada saat pelaksanaan program) belum diatasi secara profesional.
2. Kurangnya dukungan dari pimpinan, hal ini menjadikan program CSR dipersepsikan sebagai kegiatan yang penting asal dilakukan.

Fenomena yang serupa juga peneliti temukan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka terkait dengan Program CSR berupa bantuan beasiswa, yang menyatakan bahwa “Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka hanya menerima laporan pelaksanaan Program CSR dan tidak diberikan wewenang dalam menentukan murid-murid penerima beasiswa”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam pengelolaan Program CSR relatif masih rendah dan hal terlihat dari instrumen faktor kelemahan dari matriks Internal yang menunjukkan bobot skor paling tinggi diantara instrumen lainnya dalam matriks internal.

Adrianus (2009) menyatakan bahwa dalam Program CSR tercakup di dalamnya empat landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, diantaranya adalah:

1. Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi: kinerja Keuangan berjalan baik, investasi modal berjalan sehat, kepatuhan dalam pembayaran pajak, tidak terdapat praktik suap/korupsi tidak ada konflik kepentingan, tidak dalam

keadaan mendukung rezim yang korup, menghargai hak atas kemampuan intelektual/paten, dan tidak melakukan sumbangan politis/lobi,

2. Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi: tidak melakukan pencemaran, tidak berkontribusi dalam perubahan iklim, tidak berkontribusi atas limbah, tidak melakukan pemborosan air, tidak melakukan praktik pemborosan energi, tidak melakukan penyerobotan lahan, tidak berkontribusi dalam kebisingan, dan menjaga keanekaragaman hayati
3. Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi: menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak, tidak mempekerjakan anak, memberikan dampak positif terhadap masyarakat, melakukan proteksi konsumen, menjunjung keberanekaragaman, menjaga privasi, melakukan praktik kerja sesuai dengan kebutuhan, bertanggungjawab dalam proses *Outsourcing* dan *off-shoring*, dan akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar
4. Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan, meliputi: memberikan kompensasi terhadap karyawan, memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah, menjaga kesehatan karyawan, menjaga keamanan kondisi tempat kerja, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, dan menjaga keseimbangan kerja/hidup.

Dalam konteks penerapan CSR, *stakeholder* wajib dirangkul dan dilibatkan baik dalam tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Jikapun *stakeholder* tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, setidaknya mendapatkan kontribusi berupa dampak positif dari program yang dilaksanakan. Andai terdapat satu *stakeholder* tidak mendapatkan manfaat atau kepuasan dari perusahaan, maka berpotensi menjadi masalah bagi keberlanjutan perusahaan dikemudian hari (Adrianus, 2009).

KESIMPULAN

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam pengelolaan Program CSR berada dalam kondisi belum mampu memanfaatkan peluang secara optimal dan sangat lemah dalam mengatasi masalah atau hambatan yang dihadapi. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam penerapan strategi pengelolaan CSR di Kabupaten Kolaka adalah: (Kekuatan), Regulasi Tersedia, SDM Tersedia, Political will pemerintah daerah, (Kelemahan), Keterlibatan

Pemda kurang dan pelaksanaan CSR, Laporan Penggunaan Dana CSR bersifat administrative, Dana CSR di Kelola Perusahaan, (Peluang), Jumlah perusahaan Pertambangan cukup banyak, Sumber daya alam (nikel) berlimpah, Sebagai sumber pembiayaan Program Pembangunan, (Ancaman), Lemahnya kordinasi antara perusahaan dengan Pemerintah daerah, Pengelolaan Dana CSR sentralistik dan Rendahnya sinkronisasi program CSR dengan Program Pembangunan Pemda.

Implementasi Program CSR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama Perusahaan terhadap Masyarakat Kabupaten Kolaka masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan dampak Program CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kolaka hanya dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar Perusahaan.

1. Kordinasi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan Program CSR lebih ditingkatkan di masa mendatang
2. Sinkronisasi antara Program CSR dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebaiknya lebih diperhatikan sehingga Program CSR yang akan dilaksanakan sejalan dengan Program Pemerintah Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus, T. (2009). Materi Training CSR as per ISO 2006. *Jakarta: Valueconsult.*
- Badaruddin, M. (2018). Dinamika Industri Migas dan Pertambangan di Indonesia.
- Fahrial, F., Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 251-264.
- García-Chiang, A. (2018). Corporate social responsibility in the Mexican oil industry: Social impact assessment as a tool for local development. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 3(1), 15.
- Gumuru, D. (2018). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. Nusa Halmahera Minerals. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(002).
- Hakim, D. A., Hermanto, A., & Fikri, A. (2019). Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(2), 245-266.
- Lawrence, A. T., & Weber, J. (2014). *Business and society: Stakeholders, ethics, public policy*. Tata McGraw-Hill Education.

- Mallik, B., & Sahu, D. (2015). Influence of Corporate Social Responsibility on Brand Building-A Holistic Approach. *Srusti Management Review*, 8(2), 34-37.
- Miras-Rodríguez, M. D. M., Bravo-Urquiza, F., & Escobar-Pérez, B. (2020). Does corporate social responsibility reporting actually destroy firm reputation?. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(4), 1947-1957.
- Muttakin, M. B., & Khan, A. (2014). Determinants of corporate social disclosure: Empirical evidence from Bangladesh. *Advances in Accounting*, 30(1), 168-175.
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61-66.
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61-66.
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). In *Proceeding Biology Education Conference* (Vol. 14, No. 1, pp. 224-228).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15. (2014). Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Pradita, R. A., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Pramukti, A., & Buana, A. P. (2019). Pengungkapan Tanggungjawab Sosial dan Kinerja Keuangan. *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)*, 3(2), 301-306.
- Rinawati, H. S., & Sadewo, F. S. (2019). Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 67-77.
- Rosilawati, Y., & Mulawarman, K. (2019). Kearifan Lokal Tri Hita Karana Dalam Program Corporate Social Responsibility. *Jurnal ASPIKOM*, 3(6), 1215-1227.
- Sosilawati, S. T., Wahyudi, A. R., ST, M. R., Mahendra, Z. A., Wibowo Massudi, S. T., ST Mulyani, N., & ST Mona, H. L. L. (2016). *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi* (Vol. 1). PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR, BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT..
- Tilt, C. A. (2016). Corporate social responsibility research: The importance of context. *International journal of corporate social responsibility*, 1(1), 1-9.

- Torrigo, B. H., Frank, B., & Tavera, C. A. (2018). Corporate social responsibility in Bolivia: meanings and consequences. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 3(1), 7.
- Widiastuti, H., Utami, E. R., & Handoko, R. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Growth, dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2015). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 107-117.
- Yulina, L., & Sobandi, B. (2020). Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR)(Kasus Pt. Pindad). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 18(2), 198-235.
- Zuraidah, E. (2019). KONTRIBUSI AGROINDUSTRI KELAPA SAWIT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). *Jurnal at-Taghyir*, 1(2), 68-84.